

LKjIP 2023



LAPORAN

KINERJA INSTANSI

PEMERINTAH



**DINAS PERINDUSTRIAN DAN TENAGA KERJA
KABUPATEN TEMANGGUNG**

Jalan Gajah Mada No. 76 Temanggung 56221 Telp. (0293) 491949 Fax (0293) 492327

Surat elektronik : disnakertmg@gmail.com

Laman : dinperinaker.temanggungkab.go.id

KATA PENGANTAR

Dengan mengucapkan puji syukur ke hadirat Allah Yang Maha Kuasa atas rahmat dan Karunia-Nya, kami dapat menyelesaikan Penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja Kabupaten Temanggung Tahun 2023. LKjIP Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja 2023 merupakan bentuk komitmen nyata dari Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja dalam mengimplementasikan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) sebagaimana diamanatkan dalam PP nomor 8 tahun 2006 tentang Laporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah yang diatur kemudian dalam Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah dan secara teknis diatur dalam Peraturan Menteri PAN dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja. Pelaporan kinerja dan tata cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah.

LKjIP adalah wujud pertanggungjawaban pejabat publik kepada masyarakat tentang kinerja lembaga pemerintah selama satu tahun anggaran. Kinerja Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja telah diukur, dievaluasi, dianalisis dan dijabarkan dalam bentuk LKjIP Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja.

Tujuan penyusunan LKjIP adalah untuk menggambarkan penerapan Rencana Strategis (Renstra) dalam pelaksanaan tugas pokok dan fungsi organisasi di masing-masing perangkat daerah, serta keberhasilan capaian sasaran saat ini untuk percepatan dalam meningkatkan kualitas capaian kinerja yang diharapkan pada tahun yang akan datang. Melalui penyusunan LKjIP juga dapat memberikan gambaran penerapan prinsip-prinsip good governance, yaitu dalam rangka terwujudnya transparansi dan akuntabilitas di lingkungan pemerintah.

Demikian LKjIP ini kami susun semoga dapat digunakan sebagai bahan bagi pihak – pihak yang berkepentingan khususnya untuk peningkatan kinerja dimasa mendatang.

Temanggung, Maret 2024

Kepala Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja
Kabupaten Temanggung



Dra. SRI ENDANG PRAPTANINGSIH, M.Si.
Pembina Tingkat I
NIP. 19660712 199403 2 006



PEMERINTAH KABUPATEN TEMANGGUNG

INSPEKTORAT

Jalan Jendral Ahmad Yani Nomor 32 Temanggung Kode Pos 56216 Telepon 0293 492422 Faximili 0293 491040
surat elektronik: temanggunginspektorat@gmail.com laman: www.inspektorattemanggungkab.go.id

PERNYATAAN TELAH DIREVIU

Kami telah mereviu Laporan Kinerja Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja Kabupaten Temanggung untuk Tahun Anggaran 2023 sesuai Pedoman Reviu atas Laporan Kinerja. Substansi informasi yang dimuat dalam Laporan Kinerja menjadi tanggung jawab manajemen Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja Kabupaten Temanggung.


Reviu bertujuan untuk memberikan keyakinan terbatas bahwa laporan kinerja telah disajikan secara akurat, andal, dan valid.

Berdasarkan reviu kami, tidak terdapat kondisi atau hal-hal yang menimbulkan perbedaan dalam meyakini keandalan informasi yang disajikan di dalam laporan kinerja ini.

Temanggung, Februari 2024

INSPEKTUR

KABUPATEN TEMANGGUNG,


Te. KRISTRI WIDODO, M.Si.
Pembina Utama Muda
NIP. 196612111994031005

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
KATA PENGANTAR	ii
DAFTAR ISI	iii
DAFTAR TABEL	v
DAFTAR GAMBAR	vi
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Gambaran Umum Perangkat Daerah	1
1. Latar Belakang	1
2. Tugas Pokok dan Fungsi	1
3. Susunan Organisasi	2
4. Isu Strategis	6
B. Dasar Hukum, Tujuan, dan Manfaat LKjIP	7
1. Dasar Hukum	7
2. Tujuan LKjIP	7
3. Manfaat LKjIP	8
C. Sistematika Penyajian	8
BAB II PERENCANAAN KINERJA	9
A. Visi Misi Organisasi	9
1. Visi Daerah	9
2. Misi Daerah	9
B. Tujuan, Sasaran, Program dan Kegiatan	11
1. Tujuan	11
2. Sasaran	11
3. Program dan Kegiatan	11
C. Indikator Kinerja Utama Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja	14
D. Rencana Anggaran Tahun 2022	18
BAB III AKUNTABILITAS KINERJA	19
A. Capaian Kinerja Organisasi	19
1. Capaian Indikator Kinerja Utama	19
2. Capaian Kinerja Sasaran dan Indikator Program	26
B. Realisasi Anggaran	41
1. Laporan Realisasi Anggaran Tahun 2023	41
2. Analisa Efisiensi	43
C. Prestasi dan Penghargaan	44

BAB IV PENUTUP	45
A. Tinjauan Umum Capaian Kinerja Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja	45
B. Strategi Untuk Peningkatan Kinerja di Masa Datang	45

DAFTAR TABEL

Tabel 1.1	Jumlah Pegawai, Kualifikasi Pendidikan, Pangkat dan Golongan Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja Tahun 2023	5
Tabel 1.2	Sarana dan Prasarana Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja Kabupaten Temanggung Tahun 2023	6
Tabel 2.1	Tujuan dan Sasaran Misi 2 (Kedua) RPJMD Tahun 2018 – 2023	11
Tabel 2.2	Sasaran dan Indikator Kinerja Utama (IKU) Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja Kabupaten Temanggung	14
Tabel 2.3	Perjanjian Kinerja Kepala Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja Kabupaten Temanggung Tahun 2023	15
Tabel 2.4	Sasaran Program dan Indikator Kinerja Program Dinas Perindustrian Dan Tenaga Kerja Tahun 2023	16
Tabel 2.5	Rencana Anggaran Per Sasaran Tahun 2023	18
Tabel 3.1	Capaian Indikator Kinerja Utama Sasaran Strategis 1 Tahun 2023 ..	19
Tabel 3.1.1	Realisasi dan Capaian Indikator Kontribusi Sektor Perindustrian Terhadap PDRB Tahun 2018 – 2023	20
Tabel 3.2	Perbandingan Kontribusi Sektor Perindustrian Kabupaten Temanggung Dengan Provinsi Jawa Tengah dan Nasional Tahun 2020 – 2023	21
Tabel 3.3	Capaian Indikator Kinerja Utama Sasaran Strategis 2 Tahun 2023 ..	23
Tabel 3.3.1	Realisasi dan Capaian Indikator Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja Tahun 2018 – 2023	24
Tabel 3.4	Perbandingan Capaian TPAK Kab. Temanggung, Prov. Jateng dan Nasional Tahun 2020 - 2023	25
Tabel 3.5	Capaian Indikator Kinerja Sasaran Program 1 Tahun 2023	27
Tabel 3.6	Capaian Indikator Kinerja Sasaran Program 2 Tahun 2023	29
Tabel 3.7	Capaian Indikator Kinerja Sasaran Program 3 Tahun 2023	32
Tabel 3.8	Capaian Indikator Kinerja Sasaran Program 4 Tahun 2023	35
Tabel 3.9	Capaian Indikator Kinerja Sasaran Program 5 Tahun 2023	38
Tabel 3.10	Anggaran dan Realisasi Pendapatan Tahun 2023 Per 30 Desember	41
Tabel 3.11	Realisasi Anggaran Tahun 2023	41
Tabel 3.12	Analisa Efisiensi Anggaran dan Capaian Kinerja Sasaran	43

DAFTAR GAMBAR

Gambar 1.1 Bagan Organisasi Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja Kabupaten Temanggung	4
Gambar 2.1 Cascading Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja	13
Gambar 3.1 Dokumentasi Kegiatan yang Mendukung Sasaran Strategis 1	23
Gambar 3.2 Kegiatan Pelatihan dan Fasilitasi Rekrutmen Dinas Perindustrian Dan Tenaga Kerja Kabupaten Temanggung Tahun 2023	26
Gambar 3.3 Kegiatan Pelatihan Berbasis Kompetensi Tahun 2023	28
Gambar 3.4 Kegiatan Pelatihan Kewirausahaan Program Penempatan Tenaga Kerja Tahun 2023	31
Gambar 3.5 Kegiatan Fasilitasi Rekrutmen Di Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja Tahun 2023	32
Gambar 3.6 Dokumentasi Kegiatan Pada Program Hubungan Industrial	34
Gambar 3.7 Kegiatan Sosialisasi TKDN dan P3DN serta Sosialisasi Dan Pendampingan SIINas Bagi IKM Tahun 2023	40
Gambar 3.8 Piagam Penghargaan Dinperinaker Tahun 2023	44

BAB I

PENDAHULUAN

A. Gambaran Umum Perangkat Daerah

A. Latar Belakang

Menindaklanjuti Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) serta Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah yang bertujuan untuk meningkatkan pelaksanaan pemerintah yang berdayaguna, berhasil guna, bersih dan bertanggung jawab, telah diterbitkan.

Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah adalah perwujudan kewajiban suatu instansi pemerintah untuk mempertanggungjawabkan keberhasilan atau kegagalan pelaksanaan visi dan misi organisasi dalam mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan melalui alat pertanggungjawaban secara periodik. Untuk mencapai Akuntabilitas Instansi Pemerintah yang baik, Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja Kabupaten Temanggung selaku unsur pembantu pimpinan, dituntut selalu melakukan pembenahan kinerja. Pembenahan kinerja diharapkan mampu meningkatkan peran serta fungsi Dinperinaker sebagai sub sistem dari sistem Pemerintahan Daerah yang berupaya memenuhi aspirasi masyarakat.

Dalam pelaksanaan perencanaan pembangunan daerah Kabupaten Temanggung, capaian tujuan dan sasaran pembangunan yang dilakukan tidak hanya mempertimbangkan visi dan misi daerah, tetapi mensinergikan dengan tujuan dan sasaran yang ingin dicapai pada lingkup pemerintahan Kabupaten, Propinsi dan Nasional. Sehubungan dengan hal tersebut diwajibkan untuk menyusun Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Penyusunan LKjIP Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja Kabupaten Temanggung Tahun 2023 yang dimaksudkan sebagai perwujudan akuntabilitas penyelenggaraan kegiatan yang dicerminkan dari pencapaian kinerja, visi, misi, realisasi pencapaian indikator kinerja utama dan sasaran dengan target yang telah ditetapkan.

2. Tugas Pokok dan Fungsi

Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja Kabupaten Temanggung adalah perangkat daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang perindustrian, bidang tenaga kerja dan bidang transmigrasi dan merupakan perangkat daerah Tipe B yaitu perangkat daerah dengan beban kerja sedang (berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 13 Tahun 2022 tentang perubahan atas

Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Temanggung).

Berdasarkan Peraturan Bupati Temanggung Nomor 30 Tahun 2022 tentang Tugas dan Fungsi Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja Kabupaten Temanggung, disebutkan bahwa Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja Kabupaten Temanggung mempunyai tugas membantu Bupati dalam melaksanakan urusan pemerintahan bidang perindustrian dan tenaga kerja yang menjadi kewenangan daerah dan tugas pembantuan yang diberikan kepada daerah. Dalam melaksanakan Tugas Pokok sebagaimana dimaksud di atas, Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja mempunyai fungsi:

- 1) Perumusan kebijakan bidang perindustrian dan tenaga kerja;
- 2) Pelaksanaan kebijakan bidang perindustrian dan tenaga kerja;
- 3) Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan bidang perindustrian dan tenaga kerja;
- 4) Pelaksanaan pembinaan administrasi dan kesekretariatan kepada seluruh unit kerja di lingkungan Dinas;
- 5) Pelaksanaan pembinaan kepada UPT dan jabatan fungsional; dan
- 6) Pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh Bupati, sesuai dengan fungsinya.

3. Susunan Organisasi

Berdasarkan Peraturan Bupati Temanggung Nomor 30 Tahun 2022 tentang Tugas dan Fungsi Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja Kabupaten Temanggung, guna mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi di atas, maka dibentuk struktur organisasi Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja Kabupaten Temanggung, yang terdiri dari :

1. Kepala Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja, berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah. Kepala Dinas mempunyai tugas memimpin pelaksanaan tugas dan fungsi Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja.
2. Sekretaris, mempunyai melaksanakan penyiapan pelaksanaan tugas, pembinaan dan pemberian dukungan administrasi kepada seluruh unit organisasi di lingkungan dinas.

Sekretaris, membawahi 2 (dua) Kepala Sub Bagian, yaitu :

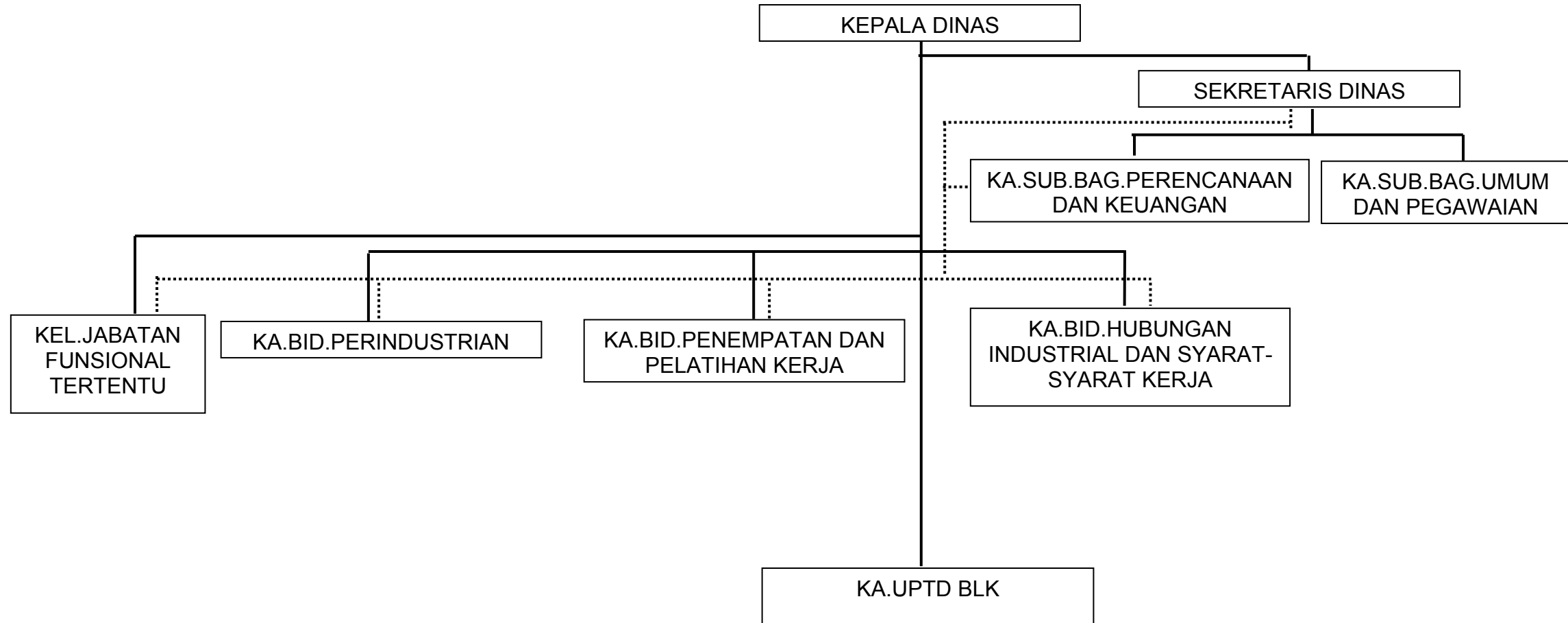
- a. Kepala Sub Bagian Umum dan Kepegawaian; yang mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Sekretaris yaitu melaksanakan penyiapan bahan perumusan kebijakan, koordinasi dan pelaksanaan kebijakan, evaluasi dan pelaporan di bidang umum, dan kepegawaian.
- b. Kepala Sub Bagian Perencanaan dan Keuangan; yang mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Sekretaris yaitu melakukan

penyiapan bahan perumusan kebijakan, koordinasi dan penyusunan perencanaan program dan kegiatan, pengelolaan keuangan, evaluasi dan pelaporan di bidang perencanaan dan keuangan.

3. Kepala Bidang Perindustrian mempunyai tugas melaksanakan penyiapan perumusan kebijakan, koordinasi dan pelaksanaan kebijakan, evaluasi dan pelaporan bidang perindustrian.
4. Kepala Bidang Penempatan dan Pelatihan Kerja mempunyai tugas melaksanakan penyiapan perumusan kebijakan, koordinasi, dan pelaksanaan kebijakan, evaluasi dan pelaporan di bidang penempatan, pelatihan, dan propduktivitas serta perluasan kesempatan kerja.
5. Kepala Bidang Hubungan Industrial dan Syarat-Syarat Kerja mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan perumusan kebijakan, koordinasi dan pelaksanaan kebijakan, evaluasi dan pelaporan di bidang hubungan industrial.
6. Kepala UPT Balai Pelatihan Kerja melakukan tugas perencanaan, pengoordinasian, pengadministrasian, pemantauan, evaluasi dan pelaporan kegiatan teknis operasional dan/ atau teknis pelatihan dan keterampilan berbasis kompetensi.
7. Kepala Sub Bagian Tata Usaha UPT BLK memiliki tugas melakukan perencanaan program, penatausahaan keuangan, pengelolaan umum pada UPT BLK.
8. Kelompok Jabatan Fungsional mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas dan fungsi dinas sesuai dengan keahlian dan kebutuhan, Kelompok Jabatan Fungsional terdiri dari sejumlah tenaga dalam jenjang jabatan fungsional yang terbagi dalam berbagai kelompok sesuai dengan bidang keahliannya.

Struktur organisasi Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja Kabupaten Temanggung sebagaimana diuraikan di atas dapat digambarkan dalam bagan organisasi sebagai mana berikut:

Gambar 1.1
Bagan Organisasi
Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja Kabupaten Temanggung



Sumber Daya Manusia pada Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja Kabupaten Temanggung keadaan sampai dengan Bulan Desember 2023, dapat dirinci sebagai berikut :

Tabel 1.1
Jumlah Pegawai, Kualifikasi Pendidikan,
Pangkat dan Golongan Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja
Tahun 2023

NO	URAIAN		JUMLAH PEGAWAI	KET
1	2		3	4
	Kondisi pegawai berdasarkan:			
1	Kualifikasi Pendidikan			
	a.	SD	-	
	b.	SMP	1	
	b.	SMA	4	
	b.	D1	1	
	c.	D2	1	
	d.	D3	8	
	e.	D4	1	
	f.	S-1	22	
	g.	S-2	7	
Jumlah			44	
2	Pangkat/Golongan			
	A	Gol I	1	
	B	Gol II	5	
	C	Gol III	30	
	D	Gol IV	8	
Jumlah			44	
3	Jabatan			
	A	Eselon II	1	
	B	Eselon III	4	
	C	Eselon IV	3	
	D	Eselon V	-	
	E	Jabatan Fungsional Khusus	28	
	F	Jabatan Fungsional Umum	8	
Jumlah			44	

Jumlah tersebut di atas masih dirasakan kurang mencukupi, guna mengatasi kekurangan sumber daya manusia di atasi dengan menggunakan bantuan tenaga kontrak non PNS terdiri dari tenaga pendukung (*supporting staff*) berjumlah 21 orang dengan latar belakang pendidikan S1, D3, D1, SMA, SMP dan SD yang terdiri dari tenaga administrasi berjumlah 8 orang, tenaga kebersihan berjumlah 6 orang, pengemudi/sopir berjumlah 1 orang dan tenaga keamanan (*security*) berjumlah 6 orang. Ketersediaan sarana dan prasarana dapat mencukupi kebutuhan dan dalam keadaan baik, sehingga dapat

mendukung kinerja Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja Kabupaten Temanggung.

Tabel 1.2
Sarana dan Prasarana Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja
Kab. Temanggung Tahun 2023

NO	JENIS SARPRAS	JUMLAH	SATUAN	KETERANGAN
1	2	3	4	5
a.	Tanah	23.085	M2	-
b.	Gedung	27	Gedung	Cukup
c.	Peralatan dan mesin	1.447	Buah	Cukup
d.	Jalan, Irigasi, dan Jaringan	14	Buah	Cukup
e.	Aset Tetap Lainnya	17	Buah	9.591.500
f.	Aset Lainnya	36	Buah	403.142.500

4. Isu Strategis

Isu strategis yang di hadapi Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja Kabupaten Temanggung dalam melaksanakan tugas dan fungsinya adalah sebagai berikut :

- a. Permasalahan terkait pekerja dengan sistem PKWT (Perjanjian Kinerja Waktu Tertentu). Masih terdapat perusahaan yang mempekerjakan pekerja dengan sistem PKWT yang mana seharusnya tidak diperuntukan untuk pekerjaan yang dilakukan pekerja terus menerus. Selain itu juga masih terdapat perusahaan yang belum mencatatkan PKWT ke Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja;
- b. Masih terdapat perusahaan yang belum membayar upah pekerja sesuai dengan ketentuan dan belum mengikutsertakan pekerja dalam program BPJS Ketenagakerjaan;
- c. Daya saing tenaga kerja rendah, sehingga perlu dipersiapkan keterampilan yang sesuai dengan kebutuhan perusahaan melalui pelatihan-pelatihan berbasis kompetensi;
- d. Lowongan kerja yang ada di perusahaan wilayah Temanggung kurang bervariasi terbatas pada sektor tertentu seperti sektor perikanan;
- e. Banyaknya industri yang mempekerjakan lulusan baru dengan kontrak kerja 10 bulan;
- f. Perlunya pendampingan IKM untuk meningkatkan daya saing;
- g. Masih perlu ditingkatkannya produktivitas wirausaha baru agar usahanya terus berlanjut dan berkembang.
- h. Paradigma Masyarakat terutama orang tua yang menghendaki keluarga

atau anaknya untuk bekerja di daerah sekitar sehingga daya juang pencari kerja untuk mendapatkan pekerjaan masih rendah.

B. Dasar Hukum, Tujuan, dan Manfaat LKjIP

1. Dasar Hukum

Dasar Hukum penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) secara umum mendasari:

1. Peraturan presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
2. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja;
3. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 88 Tahun 2021 tentang Evaluasi Akuntabilitas Kinerja instansi Pemerintah;
4. Peraturan Daerah Kabupten Temanggung Nomor 5 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupten Temanggung Nomor 2 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Temanggung Tahun 2018-2023;
5. Peraturan Bupati Nomor 100 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan bupati nomor 86 Tahun 2019 tentang indikator kinerja utama Pemerintah Kabupaten Temanggung dan Indikator Kinerja Utama Perangkat Daerah Kabupaten Temanggung;
6. Peraturan Bupati Nomor 37 Tahun 2022 tentang Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Kabupaten Temanggung.

2. Tujuan LKjIP

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Kabupaten Temanggung disusun dengan tujuan untuk mempertanggungjawabkan kinerja dalam mencapai tujuan/sasaran strategis sesuai dengan tugas pokok dan fungsi Pemerintah Daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan, serta sebagai penerima mandat kewenangan pengelolaan sumberdaya dan kebijakan yang dipercayakan oleh masyarakat kepada Pemerintah Daerah secara periodik, sehingga dapat terwujud suatu pemerintahan yang baik (*Good Governance*). Selain itu Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) juga bertujuan untuk memberikan informasi kinerja yang terukur kepada pimpinan atas kinerja Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja Kabupaten Temanggung yang telah dan seharusnya tercapai dan juga sebagai upaya perbaikan berkesinambungan bagi Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja Kabupaten Temanggung untuk meningkatkan kinerja di tahun-tahun yang akan datang.

3. Manfaat LKJIP

Sesuai dengan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja Dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah, diharapkan dapat memberikan manfaat sebagai berikut :

- a. Sebagai sarana penilaian terhadap capaian kinerja selama 1 tahun;
- b. Memberikan informasi terkait SAKIP perangkat daerah;
- c. Mendorong instansi Pemerintah dalam proses penyempurnaan dokumen perencanaan periode yang akan datang;
- d. Sebagai acuan penyempurnaan pelaksanaan program dan kegiatan yang akan datang;
- e. Laporan Akuntabilitas Keuangan Juga dapat dimanfaatkan sebagai pertimbangan penyempurnaan berbagai kebijakan yang diperlukan.

C. Sistematika Penyajian

Sistematika penyajian LKjIP Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja sebagai berikut:

Bab I : Pendahuluan

Pada bab ini disajikan penjelasan umum organisasi, dengan penekanan kepada aspek strategis serta permasalahan utama (*strategic issued*) yang sedang dihadapi.

Bab II : Perencanaan Kinerja

Pada bab ini diuraikan ringkasan/ikhtisar perjanjian kinerja tahun yang bersangkutan.

Bab III : Akuntabilitas Kinerja

Pada bab ini disajikan capaian kinerja untuk setiap pernyataan kinerja sasaran strategis sesuai dengan hasil pengukuran kinerja. Untuk setiap pernyataan kinerja sasaran strategis tersebut dilakukan analisis capaian kinerja. Selain itu juga diuraikan realisasi anggaran yang digunakan sesuai dengan kinerja organisasi dan dokumen Perjanjian Kinerja.

Bab IV : Penutup

Pada bab ini diuraikan simpulan umum atas capaian kinerja organisasi serta langkah di masa mendatang yang akan dilakukan organisasi untuk meningkatkan kinerjanya.

BAB II

PERENCANAAN KINERJA

A. Visi Misi Organisasi

1. Visi Daerah

Visi dan misi Pemerintah Kabupaten Temanggung tertuang dalam Perda Nomor 5 Tahun 2021 tentang Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Temanggung Tahun 2018-2023. Visi Kabupaten Temanggung sesuai dokumen perencanaan pembangunan daerah dimaksud, adalah:

**“TERWUJUDNYA MASYARAKAT TEMANGGUNG YANG
TENTREM, MAREM, GANDEM”.**

Pernyataan visi tersebut mengandung makna sebagai berikut:

- Tentrem** : Terwujudnya kehidupan masyarakat yang aman, rukun berdampingan secara damai tanpa memandang perbedaan suku, agama, ras, golongan, dan status sosial, penuh kegotongroyongan, saling menghormati antar masyarakat, taat kepada hukum dan menjunjung tinggi hak asasi manusia.
- Marem** : Terpenuhinya kebutuhan dasar masyarakat secara lahir dan batin, adil dan merata
- Gandem** : Masyarakat memiliki kemampuan berpikir, beraktualisasi, inovatif dan kreatif, mandiri, berdaya saing sehingga mampu berprestasi baik di tingkat regional dan global.

2. Misi Daerah

Upaya untuk mewujudkan Visi Kabupaten Temanggung Tahun 2018-2023, dirumuskan 3 (tiga) Misi Pembangunan Kabupaten Temanggung sebagai berikut:

1. Mewujudkan sumber daya manusia yang berkualitas, berkarakter, dan berdaya;
2. Mewujudkan pemberdayaan ekonomi kerakyatan yang berbasis potensi unggulan daerah dan berkelanjutan;
3. Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik dan pelayanan publik yang berkualitas

Penjelasan Makna Misi:

Misi Pertama, Manusia yang berkualitas adalah manusia yang komprehensif dalam berfikir, selalu mengantisipasi tuntutan di masa depan, memiliki sikap

positif, berperilaku terpuji, dan berwawasan, serta memiliki kemampuan, keterampilan, dan keahlian yang sesuai dengan kebutuhan diberbagai bidang pembangunan. Manusia berkarakter adalah manusia yang memiliki kepribadian dan budi pekerti yang luhur, bertanggung jawab serta menjunjung tinggi nilai-nilai kehidupan bermasyarakat seperti toleransi dan kegotongroyongan. Manusia berdaya adalah manusia yang mengerti, termotivasi, tahu berbagai alternatif, memanfaatkan peluang, berenergi, mampu bekerjasama, mampu mengambil keputusan, berani mengambil resiko, mampu mencari dan menangkap informasi, serta mampu bertahan dan bertindak sesuai dengan situasi.

Misi Kedua, Pemberdayaan ekonomi kerakyatan merupakan upaya memberdayakan kelompok ekonomi yang mendominasi struktur dunia usaha yang dikelola oleh dan untuk kelompok masyarakat. Potensi daerah adalah segala sesuatu yang dimiliki oleh suatu daerah baik yang berbentuk fisik atau non fisik yang memiliki peluang untuk dikembangkan oleh Pemerintah Daerah. Sektor unggulan adalah sektor yang pertumbuhannya cepat dan mampu bersaing dengan sektor yang sama pada wilayah regional, dan mampu menggerakkan sektor lainnya. Kabupaten Temanggung memiliki berbagai potensi unggulan daerah baik di bidang pertanian, perkebunan, industri dan pariwisata. Penguatan ekonomi yang berbasis potensi unggulan dengan berpihak kepada rakyat kecil diharapkan mampu meningkatkan kesejahteraan masyarakat, sehingga akan memutus rantai kemiskinan melalui peningkatan ekonomi masyarakat. Pembangunan ekonomi kerakyatan yang berbasis potensi unggulan daerah didukung dengan pengembangan infrastruktur daerah yang memperhatikan rencana tata ruang, dan berwawasan lingkungan.

Misi Ketiga, Tata kelola pemerintahan yang baik adalah pemerintahan yang bersih, berwibawa, bisa bergerak secara sinergis, responsif, inovatif dan mendapat dukungan dari rakyat. Tata kelola pemerintahan yang baik (*good governance*) diperlukan dalam menyelenggarakan fungsi Pemerintah sebagai penyelenggara pelayanan publik (*public service*), pelaksana pembangunan (*development*), dan pemberdayaan masyarakat (*empowering*).

Pelayanan publik yang berkualitas adalah pelayanan publik yang mengacu pada kepuasan masyarakat dan merupakan gambaran dari terwujudnya *good governance*. Terdapat empat komponen utama di dalam pelayanan publik agar menjadi berkualitas (*service excellence*), yaitu: 1)Kecepatan, 2)Ketepatan, 3)Keramahan, dan 4)Kenyamanan. Keempat komponen tersebut merupakan satu kesatuan yang terintegrasi, sehingga bila ada komponen yang kurang maka pelayanan menjadi kurang berkualitas. Kualitas jasa atau layanan yang baik akan dapat memberikan kepuasan kepada masyarakat, yang pada akhirnya akan menciptakan kepercayaan masyarakat kepada pemerintah.

B. Tujuan, Sasaran, Program Dan Kegiatan

1. Tujuan

Tujuan organisasi merupakan penjabaran atau implementasi dari pernyataan misi organisasi. Selaras dengan tujuan Misi Ke 2 RPJMD Kabupaten Temanggung Tahun 2018 – 2023 maka Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja Kabupaten Temanggung menetapkan tujuan strategis “**Meningkatkan Perekonomian Daerah Yang Berkualitas Dan Berkelanjutan**” dengan indikator tujuan Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK) dan Kontribusi Sektor Perindustrian terhadap PDRB.

2. Sasaran

Sasaran merupakan penjabaran dari tujuan organisasi dan menggambarkan hal-hal yang ingin dicapai melalui tindakan-tindakan yang akan dilakukan secara operasional. Oleh karenanya rumusan sasaran yang ditetapkan diharapkan dapat memberikan focus pada penyusunan program operasional dan kegiatan pokok organisasi yang bersifat spesifik, terperinci, dapat diukur dan dapat dicapai.

Dalam mewujudkan tujuan dan sasaran strategis Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja Kabupaten Temanggung sasaran yang ditetapkan adalah “Meningkatnya Kontribusi Sektor Perindustrian terhadap PDRB dan Meningkatnya Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK)”.

Adapun tujuan dan sasaran Renstra Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja Kabupaten Temanggung pada misi 2 RPJMD 2018 – 2023 sebagaimana tabel berikut:

Tabel 2.1
Tujuan dan Sasaran Misi 2 (Kedua) RPJMD Tahun 2018-2023

TUJUAN		SASARAN	
1		2	
Misi 2 (Kedua): Mewujudkan pemberdayaan ekonomi kerakyatan yang berbasis potensi unggulan daerah dan berkelanjutan			
1.	Meningkatkan perekonomian daerah yang berkualitas dan berkelanjutan	1.1	Meningkatnya Kontribusi Sektor Perindustrian terhadap PDRB
		1.2	Meningkatnya Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK)

3. Program dan Kegiatan

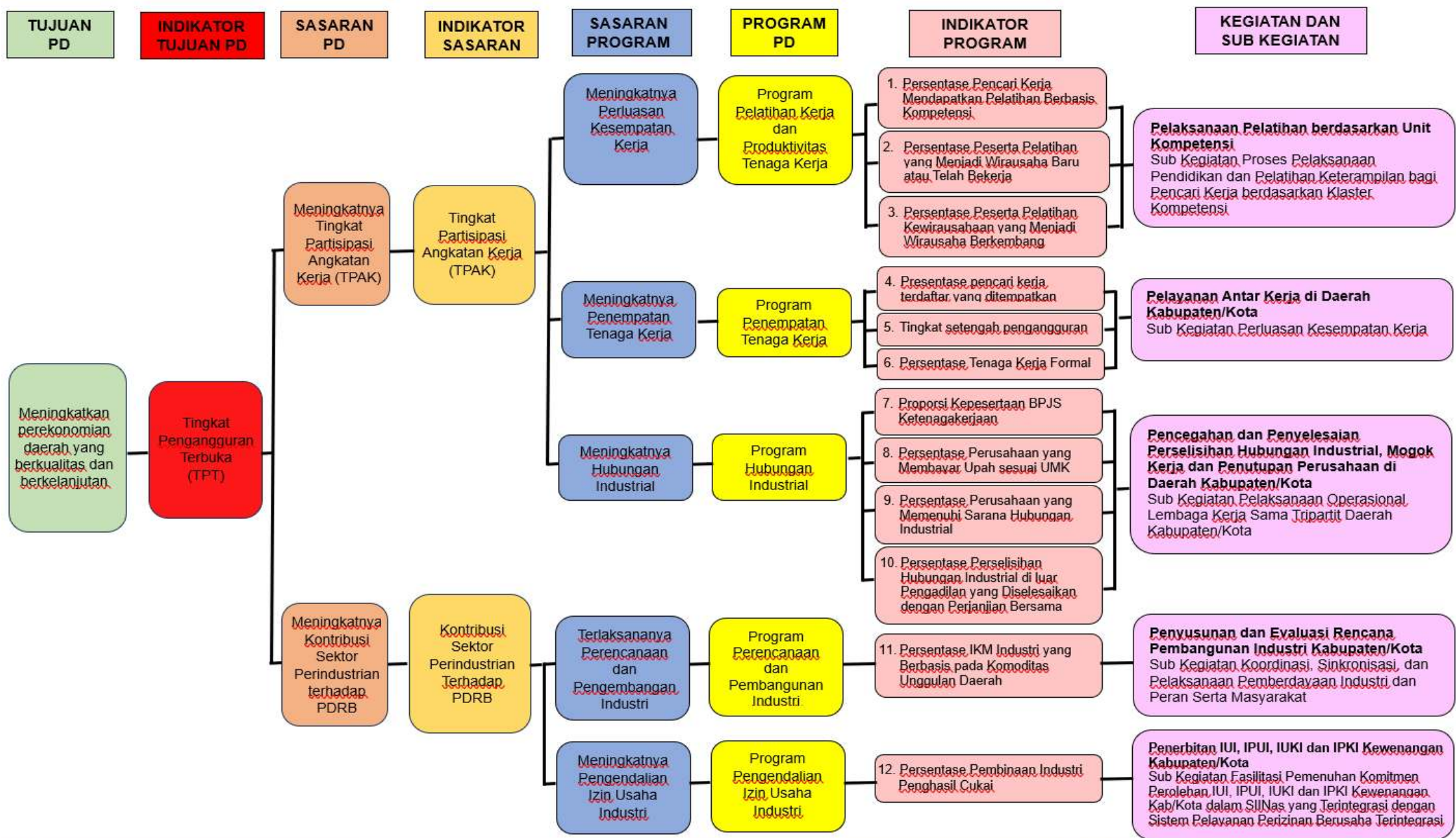
Dalam mencapai tujuan dan sasaran , pada tahun 2023 Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja melaksanakan 5 Program dan 5 Kegiatan yang meliputi :

- a. Program Pelatihan Kerja dan Produktivitas Tenaga Kerja , Kegiatan Proses Pelaksanaan Pendidikan dan Pelatihan Keterampilan Kerja Berdasarkan Klaster Kompetensi;

- b. Program Penempatan Tenaga Kerja, Kegiatan Pelayanan Antar Kerja di Daerah Kabupaten / Kota;
- c. Program Hubungan Industrial, Kegiatan Pencegahan dan Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial, Mogok Kerja dan Penutupan Perusahaan di Daerah Kabupaten/ Kota;
- d. Program Perencanaan dan Pembangunan Industri, Kegiatan Penyusunan dan Evaluasi Rencana Pembangunan Industri Kabupaten/ Kota;
- e. Program Pengendalian Izin Usaha Industri, Kegiatan Penerbitan Izin Usaha Industri (IUI), Izin Perluasan Industri (IPI), Izin Usaha Kawasan Industri (IUKI) dan Izin Perluasan Kawasan Industri (IPKI) Kewenangan Kabupaten/ Kota.

Cascading Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja dapat dilihat pada Gambar 2.1 sebagai berikut.

Gambar 2.1 Cascading Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja



C. Indikator Kinerja Utama Dinas Perindustrian Dan Tenaga Kerja

Salah satu upaya untuk Mewujudkan pemberdayaan ekonomi kerakyatan yang berbasis potensi unggulan daerah dan berkelanjutan di Kabupaten Temanggung, maka Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja Kabupaten Temanggung mempunyai Indikator Kinerja Utama yang tercantum dalam Peraturan Bupati Temanggung Nomor 100 Tahun 2021 tanggal 1 November 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Temanggung Nomor 86 Tahun 2019 tanggal 18 Desember 2019 tentang Penetapan Indikator Kinerja Utama Pemerintah Kabupaten Temanggung dan Indikator Kinerja Utama Perangkat Daerah Kabupaten Temanggung. Adapun Indikator Kinerja Utama dimaksud adalah sebagai berikut :

Tabel. 2.2
Sasaran dan Indikator Kinerja Utama (IKU)
Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja Kabupaten Temanggung

NO.	Tujuan	Sasaran	Indikator Kinerja Utama
1.	Meningkatkan perekonomian daerah yang berkualitas dan berkelanjutan	- Meningkatnya Kontribusi Sektor Perindustrian terhadap PDRB - Meningkatnya Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK)	1. Kontribusi Sektor Perindustrian terhadap PDRB 2. Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK)

Perjanjian Kinerja pada dasarnya adalah lembar/dokumen yang berisikan penugasan dari pimpinan instansi yang lebih tinggi kepada pimpinan instansi yang lebih rendah untuk melaksanakan program/kegiatan yang disertai dengan indikator kinerja. Melalui perjanjian kinerja terwujudlah komitmen penerima amanah dan kesepakatan antara penerima dan pemberi amanah atas kinerja terukur tertentu berdasarkan tugas, fungsi dan wewenang serta sumber daya yang tersedia. Kinerja yang disepakati tidak dibatasi pada kinerja yang dihasilkan atas kegiatan tahun bersangkutan, tetapi termasuk kinerja (outcome) yang seharusnya terwujud akibat kegiatan tahun-tahun sebelumnya. Dengan demikian target kinerja yang diperjanjikan juga mencakup outcome yang dihasilkan dari kegiatan tahun-tahun sebelumnya, sehingga terwujud kesinambungan kinerja setiap tahunnya.

Tujuan disusunnya Perjanjian Kinerja adalah :

1. Sebagai wujud nyata komitmen antara penerima dan pemberi amanah untuk meningkatkan integritas, akuntabilitas, transparansi, dan kinerja Aparatur.
2. Menciptakan tolok ukur kinerja sebagai dasar evaluasi kinerja aparatur.
3. Sebagai dasar penilaian keberhasilan/kegagalan pencapaian tujuan dan sasaran organisasi sebagai dasar pemberian penghargaan dan sanksi.

4. Sebagai dasar bagi pemberi amanah untuk melakukan monitoring, evaluasi, dan supervisi atas perkembangan/kemajuan kinerja penerima amanah.
5. Sebagai dasar dalam penetapan sasaran kinerja pegawai.

Dalam rangka mewujudkan Mewujudkan pemberdayaan ekonomi kerakyatan yang berbasis potensi unggulan daerah dan berkelanjutan di Kabupaten Temanggung, Kepala Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja pada Tahun 2022 telah melakukan Perjanjian Kinerja dengan Bupati Temanggung untuk mewujudkan target kinerja seperti tabel di bawah ini.

Tabel 2.3
Perjanjian Kinerja Kepala Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja
Kabupaten Temanggung Tahun 2023

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA UTAMA	SATUAN	TARGET 2023
1	2	3	4	5
1	Meningkatnya kontribusi sektor Perindustrian terhadap PDRB	Kontribusi Sektor Perindustrian Terhadap PDRB	%	27
2	Meningkatnya Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK)	Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK)	%	76,1

Untuk tercapainya indikator sasaran tujuan Kepala Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja Kabupaten Temanggung tersebut, diperlukan strategi dengan sasaran program pada Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja Kabupaten Temanggung yang mengacu pada tujuan dan sasaran RPJMD Tahun 2018 – 2023 sebagaimana tabel berikut:

Tabel 2.4
Sasaran Program dan Indikator Kinerja Program
Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja
Tahun 2023

NO	SASARAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM		RUMUS	SATUAN	TARGET 2023
1	2	3		4	5	6
1	Meningkatnya Perluasan Kesempatan Kerja	1	Persentase Pencari Kerja Mendapatkan Pelatihan Berbasis Kompetensi	Jumlah peserta pelatihan berbasis kompetensi dibagi jumlah pendaftar pelatihan dikali 100%	%	65
		2	Persentase Peserta Pelatihan yang Menjadi Wirausaha Baru atau Telah Bekerja	Jumlah lulusan pelatihan yang telah bekerja atau membuka usaha sendiri dibagi dengan jumlah peserta pelatihan dikali 100 %	%	45
		3	Persentase Peserta Pelatihan Kewirausahaan yang Menjadi Wirausaha Berkembang	Jumlah peserta pelatihan kewirausahaan yang meningkat produktivitasnya (kuantitas dan kualitas) dibagi jumlah peserta pelatihan kewirausahaan dikali 100%	%	45
2	Meningkatnya Penempatan Tenaga Kerja	4	Presentase pencari kerja terdaftar yang ditempatkan	Jumlah pencari kerja terdaftar yang ditempatkan dibagi jumlah pencari kerja terdaftar dikali 100%	%	65
		5	Tingkat setengah pengangguran	Jumlah Pengangguran setengah menganggur dibagi jumlah angkatan kerja dikali 100%	%	5,7
		6	Persentase Tenaga Kerja Formal	Jumlah tenaga kerja formal dibagi jumlah tenaga kerja total dikali 100%	%	31
3	Meningkatnya Hubungan Industrial	7	Proporsi Kepesertaan BPJS Ketenagakerjaan	Jumlah pekerja peserta BPJS dibagi jumlah pekerja total dikali 100%	%	79
		8	Persentase Perusahaan yang Membayar Upah sesuai UMK	Jumlah perusahaan yang membayarkan upah sesuai UMK dibagi jumlah perusahaan dikali 100%	%	58

NO	SASARAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM		RUMUS	SATUAN	TARGET 2023
1	2	3		4	5	6
		9	Persentase Perusahaan yang Memenuhi Sarana Hubungan Industrial	Jumlah perusahaan yang memenuhi sarana hubungan industrial dibagi jumlah perusahaan dikali 100%	%	45
		10	Persentase Perselisihan Hubungan Industrial di luar Pengadilan yang Diselesaikan dengan Perjanjian Bersama	Jumlah perselisihan yang terselesaikan dengan PB dibagi jumlah perselisihan yang masuk dikali 100%	%	100
4	Terlaksananya Perencanaan dan Pengembangan Industri	11	Persentase IKM Industri yang Berbasis pada Komoditas Unggulan Daerah	Jumlah IKM Unggulan Daerah yang Terfasilitasi yang dibagi Jumlah IKM Unggulan Daerah dikali 100%	%	35
5	Meningkatnya Pengendalian Izin Usaha Industri	12	Persentase Pembinaan Industri Penghasil Cukai	Jumlah IKM Tembakau yang dibina dibagi Jumlah IKM Tembakau dikali 100%	%	5,3

D. Rencana Anggaran Tahun 2022

Guna mewujudkan kinerja yang telah ditetapkan, maka Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja Kabupaten Temanggung Tahun 2023 melaksanakan Rencana Program dan Kegiatan yang terdiri dari program, kegiatan, dan sub kegiatan tersebut dibutuhkan pendanaan indikatif berdasarkan kelompok sasaran dan mengalokasikan anggaran sebesar Rp. 8.464.323.839,- yang terdiri dari Belanja Gaji sebesar 5.310.045.038,- dan Belanja Program/ Kegiatan sebesar Rp. 3.154.278.801,-

Adapun komposisi belanja langsung dari program/kegiatan yang menunjang sasaran strategis Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja Kabupaten Temanggung adalah sebagai berikut:

Tabel 2.5
Rencana Anggaran per Sasaran Tahun 2023

NO	SASARAN STRATEGIS	RENCANA ANGGARAN TAHUN 2023 (Rp)	
		RENJA	APBD
1	Meningkatnya Perluasan Kesempatan Kerja	655.425.000	847.525.500
2	Meningkatnya Penempatan Tenaga Kerja	115.000.000	390.191.000
3	Meningkatnya Hubungan Industrial	135.000.000	30.000.000
4	Terlaksananya Perencanaan dan Pengembangan Industri	906.660.000	646.291.800
5	Meningkatnya Pengendalian Izin Usaha Industri	900.000.000	150.000.000
NO	SASARAN STRATEGIS	RENCANA ANGGARAN TAHUN 2023 (Rp)	
		RENJA	APBD
1	Terselenggaranya koordinasi dan pelayanan administrasi, sarana dan prasarana dan kebutuhan kedinasan	5.518.801.896	5.310.045.038

BAB III AKUNTABILITAS KINERJA

A. Capaian Kinerja Organisasi

1. Capaian Indikator Kinerja Utama

Capaian kinerja Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja disajikan berdasarkan hasil pengukuran Indikator Kinerja Utama (IKU). Capaian IKU diperoleh berdasarkan pengukuran atas indikator kinerja tujuan yang ditetapkan dalam Rencana Strategis (Renstra), yang selanjutnya diukur berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah dan Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, serta Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Laporan Kinerja Instansi Pemerintah dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah.

a. Sasaran Strategis 1. Meningkatnya Kontribusi Sektor Perindustrian Terhadap PDRB.

Pengukuran capaian kinerja Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja Kabupaten Temanggung Tahun 2023 dengan cara membandingkan antara target (rencana) dan realisasi IKU. Dari hasil pengukuran kinerja tersebut diperoleh data bahwa nilai capaian kinerja sasaran sebesar 97% atau kategori “**Sangat Baik**” sebagaimana tabel 3.1 dibawah ini:

Tabel 3.1
Capaian Indikator Kinerja Utama Sasaran Strategis 1
Tahun 2023

IKU	Satuan	Capaian 2022	Tahun 2023			Renstra 2019 – 2023		
			Target	Realisasi	% Capaian	Target Akhir 2023	Capaian 2023	Capaian Kinerja s/d 2023
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
Kontribusi Sektor Perindustrian Terhadap PDRB	%	100	27	26,19	97	27	26,19	97
Rata-Rata Capaian Indikator Kinerja Utama		100			97			97

Sumber : Data IKPD Dinperinaker 2023

Dari tabel diatas dapat dilihat bahwa realisasi kinerja Sasaran 1. Meningkatnya Kontribusi Sektor Perindustrian Terhadap PDRB dengan indikator Kontribusi Sektor Perindustrian terhadap PDRB pada tahun 2023 adalah 26,19% dari target 27% atau tercapai 97%, jika dibandingkan dengan capaian tahun sebelumnya, indikator ini mengalami penurunan sebesar 3% dari capaian 100%. Hal ini disebabkan karena adanya penurunan industri pengolahan dari tahun 2022 hingga 2023, dengan beberapa faktor penghambat antara lain penurunan jumlah

industri pengolahan kayu di Kabupaten Temanggung dimana industri tersebut merupakan salah satu sektor industri utama di Kabupaten Temanggung. Faktor yang mendorong pencapaian sasaran ini adalah adanya peningkatan pertumbuhan industri kecil yang berkembang, jumlah industri bertambah sehingga lapangan pekerjaan juga bertambah.

Data realisasi dan capaian indikator Kontribusi Sektor Perindustrian terhadap PDRB tahun 2018 – 2023 dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 3.1.1
Realisasi dan Capaian Indikator Kontribusi Sektor Perindustrian terhadap PDRB Tahun 2018 – 2023

No.	Tahun	Target(%)	Realisasi(%)	Capaian (%)
1.	2018	n.a	27,31	-
2.	2019	26,83	27,21	100
3.	2020	24	27,46	100
4.	2021	25	27,11	100
5.	2022	26	26,19	100
6.	2023	27	26,19	97

Dari tabel diatas dapat dilihat bahwa realisasi indikator Kontribusi Sektor Perindustrian terhadap PDBR Kabupaten Temanggung cukup fluktuatif. Pada tahun 2020 terjadi peningkatan kontribusi sektor Perindustrian terhadap PDRB sebesar 0.25%. Namun dari tahun 2020 hingga tahun 2023 realisasi indikator ini terus mengalami penurunan. Pada tahun 2021 terjadi penurunan sebesar 0,35% dan pada tahun 2022 sebesar 0.92%. Data tahun 2023 masih menggunakan angka realisasi tahun 2022 dikarenakan data tahun 2023 belum dirilis pada website resmi BPS Kabupaten Temanggung. Capaian indikator ini pada tahun 2023 hanya sebesar 97% dari target 27% hanya tercapai 26,19%. Jika dibandingkan dengan tahun 2022, capaian indikator ini mengalami penurunan sebesar 3%. Hal ini karena adanya penurunan permintaan produksi industri pengolahan kayu dari tahun 2022 hingga tahun 2023 yang menyebabkan ada perusahaan yang tutup dan terjadinya PHK , dimana industri tersebut merupakan sektor industri utama di Kabupaten Temanggung.

Untuk mengetahui perbandingan capaian Kabupaten Temanggung dengan capaian Provinsi Jawa Tengah dan Nasional dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 3.2

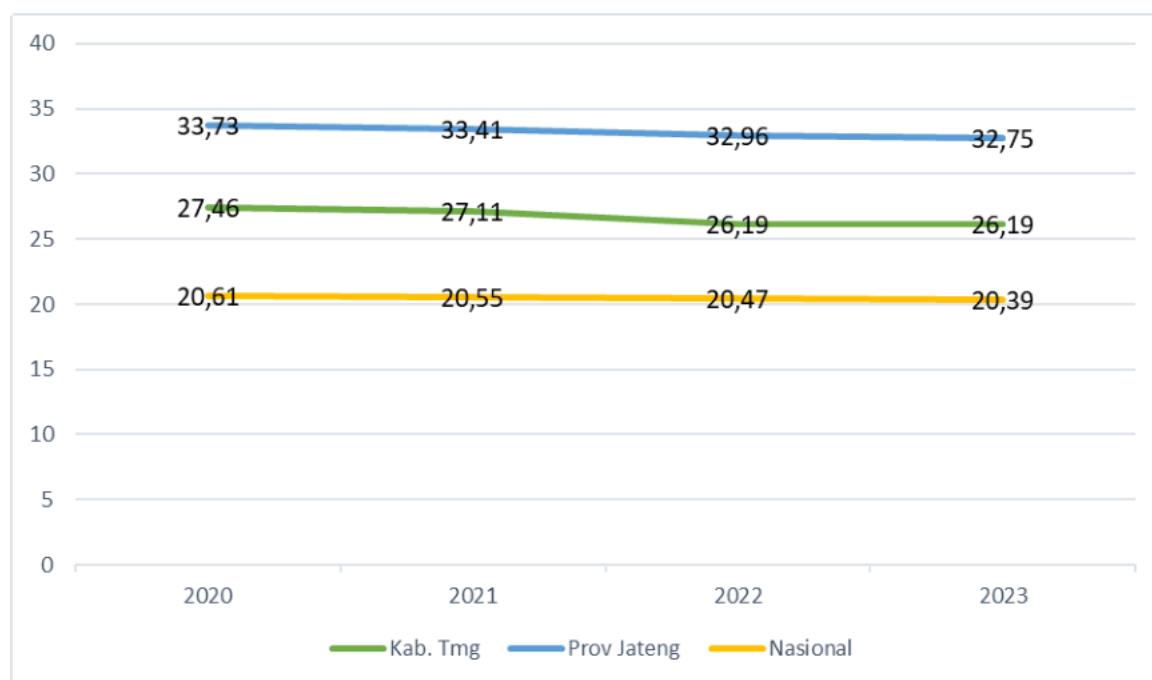
Perbandingan Kontribusi Sektor Perindustrian Kabupaten Temanggung dengan Provinsi Jawa Tengah dan Nasional Tahun 2020 – 2023

No.	Tahun	Kab. Temanggung (%)	Prov. Jateng (%)	Nasional (%)
1.	2020	27,46	33,73	20,61
2.	2021	27,11	33,41	20,55
3.	2022	26,19	32,96	20,47
4.	2023	26,19	32,75	20,39

Sumber : www.bps.go.id

Grafik 3.1

Perbandingan Capaian Kab. Temanggung dengan Prov. Jateng dan Nasional Tahun 2020 – 2023



Dari tabel dan grafik diatas dapat dilihat bahwa Kontribusi Sektor Perindustrian Terhadap PDRB Kabupaten Temanggung berada diantara capaian Provinsi Jawa Tengah dan Nasional. Dari tahun 2020 – 2023 capaian Kab. Temanggung terus mengalami penurunan dari 27,46% menjadi 26,19%. Meskipun demikian capaian Kabupaten Temanggung tetap lebih tinggi dibandingkan dengan capaian Nasional, namun lebih rendah dibandingkan capaian Provinsi Jawa Tengah. Persentase indikator ini terus mengalami penurunan dari tahun 2020 hingga tahun 2023.

BAB IV P E N U T U P

A. Tinjauan Umum Capaian Kinerja Dinas Perindustrian Dan Tenaga Kerja

Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja Kabupaten Temanggung sebagai perangkat daerah yang mempunyai tugas pokok melaksanakan urusan pemerintah di bidang perindustrian dan ketenagakerjaan mempunyai fungsi untuk memberikan pelayanan di bidang tenaga kerja dan perindustrian pada masyarakat. Agar pelaksanaan tugas dan fungsi tersebut berjalan secara optimal maka diperlukan pengelolaan SDM, sumber dana dan sarana secara efektif dan efisien.

Dengan memperhatikan uraian dan beberapa data tersebut di atas, maka dapat disimpulkan bahwa Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja dalam melaksanakan tugasnya belum berhasil, karena 2 (dua) Indikator Kinerja Utama Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja Kabupaten Temanggung yaitu Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK) dan Kontribusi Sektor Perindustrian terhadap PDRB belum tercapai 100% sesuai target yang telah ditetapkan, yaitu dengan capaian sebesar 99,6% dan 97%. Walaupun IKU tidak dapat tercapai 100% tetapi rata-rata capaian IKU masih dalam kategori "Sangat Baik". Hal ini karena IKU yang diampu oleh Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja merupakan indikator makro yang seharusnya capaian indikator tersebut juga harus didukung oleh beberapa perangkat daerah lainnya yang saling berkaitan. Selain itu data capaian Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK) dan Kontribusi Sektor Perindustrian terhadap PDRB diambil dari data capaian kinerja BPS.

Hasil pengukuran rata-rata capaian indikator kinerja sasaran dari 5 (lima) program Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja, terdapat 4 (empat) indikator sasaran program telah tercapai 100% dan terjadi efisiensi sumber daya, serta 1 (satu) indikator sasaran program tidak tercapai dan terjadi inefisiensi sumber daya.

B. Strategi Untuk Peningkatan Kinerja di Masa Datang

Strategi yang diperlukan guna meningkatkan kinerja Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja di masa mendatang antara lain :

1. Melakukan pendampingan pendaftaran TKDN (Tingkat Komponen Dalam Negeri) kepada IKM dan Pembinaan perizinan IKM melalui akun SIINas;
2. Melakukan bimbingan Teknik dan seminar pemasaran digital wirausaha kopi;
3. Bimbingan Teknis dan seminar peluang usaha industri produk berbahan baku limbah;
4. Memberikan penawaran program pelatihan berbasis kompetensi untuk pencari kerja;
5. Menyebarluaskan informasi lowongan kerja secara online dan offline baik informasi diluar daerah maupun lokal serta memfasilitasi proses rekrutmen

(untuk pemberi kerja dan pencari kerja) di Kantor Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja;

6. Terus meningkatkan pembinaan kepada Pengusaha pentingnya mengikutsertakan pekerja dalam program BPJS Ketenagakerjaan serta mensejahterakan pekerjanya karena dengan meningkatnya kesejahteraan pekerja maka akan mempengaruhi produktivitas kerjanya;
7. Memberikan pemahaman kepada para pihak agar menyelesaikan perselisihan hubungan industrial melalui Mediator dengan Perjanjian Bersama;
8. Pendampingan dan monitoring dari stakeholder terkait untuk mendukung perkembangan usaha, contohnya melibatkan produk wirausaha baru dalam even pameran di Pemerintah Daerah, pelatihan dalam pengemasan produk dan sebagainya;
9. Mengarahkan peserta wirausaha baru untuk membentuk kelompok usaha dan mengajukan proposal program Tenaga Kerja Mandiri di Kementerian Ketenagakerjaan untuk memperoleh pendampingan dan dukungan modal usaha;
10. Pelaksanaan sosialisasi langsung ke desa-desa agar informasi terkait pelatihan yang ada di Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja dapat tersebar luas dan menambah minat masyarakat untuk mengikuti pelatihan.

Demikian LKjIP Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja Kabupaten Temanggung Tahun 2023 ini disusun, semoga dapat bermanfaat untuk evaluasi akuntabilitas kinerja pihak terkait, penyempurnaan dokumen untuk periode yang akan datang, penyempurnaan penyusunan program dan kegiatan yang akan datang.

Temanggung, Maret 2024

KEPALA DINAS
PERINDUSTRIAN DAN TENAGA KERJA
KABUPATEN TEMANGGUNG


Dra. SRI ENDANG PRAPTANINGSIH, M.Si.

Pembina Tingkat I

NIP. 19660712 199403 2 006

LAMPIRAN

PERJANJIAN KINERJA PERUBAHAN
TAHUN 2023

**EVALUASI HASIL PELAKSANAAN RENJA PERANGKAT DAERAH TAHUN 2023 s.d TW IV
DINAS PERINDUSTRIAN DAN TENAGA KERJA KABUPATEN TEMANGGUNG**

Sasaran RKPd yang akan dicapai dalam Renja PD :

Meningkatkan pemberdayaan ekonomi kerakyatan dalam upaya memberdayakan kelompok ekonomi yang mendominasi struktur dunia usaha yang dikelola oleh dan untuk kelompok masyarakat

NO	BIDANG/ PROGRAM/ KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM/KEGIATAN	SATUAN	TARGET 2023			REALISASI PER TRIWULAN Th. 2023								REALISASI 2023		CAPAIAN 2023		KET
				K	Rp (RENJA)	Rp (DPA)	I		II		III		IV		K	Rp	K	Rp	
							K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp					
1	2	3	4	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	28
A	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG TENAGA KERJA																		
1	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA																		
	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah																		
	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	Orang/Bln	12	5.518.801.896	5.310.045.038	3	975.912.748	3	1.947.501.460	3	1.149.806.237	3	1.157.157.349	12	5.230.377.794,00	100	98,50	
	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah																		
	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Paket Pakaian Beserta Atribut Kelengkapannya	Paket	1	17.616.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00	
	Administrasi Umum Perangkat Daerah																		
	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	Paket	12	10.000.000	11.000.000	3	1.026.000	3	2.873.000	3	6.096.500	3	997.000	12	10.992.500,00	100	99,93	
	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	Paket	1	20.139.000	32.639.000	0,25	1.916.000	0,25	7.636.000	0,25	11.255.500	0,25	11.814.250	1	32.621.750,00	100	99,95	
	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	Paket	1	17.991.450	17.891.450	0,25	315.000	0,25	5.430.200	0,25	8.630.000	0,25	3.436.000	1	17.811.200,00	100	99,55	
	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	Laporan	12	42.324.000	20.000.000	3	1.464.000	3	3.737.000	3	3.947.000	3	10.466.500	12	19.614.500,00	100	98,07	
	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Laporan	12	70.000.000	47.000.000	3	2.260.000	3	14.369.000	3	9.761.875	3	20.567.753	12	46.978.628,00	100	99,95	
	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah																		

NO	BIDANG/ PROGRAM/ KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM/KEGIATAN	SATUAN	TARGET 2023			REALISASI PER TRIWULAN Th. 2023								REALISASI 2023		CAPAIAN 2023		KET
				K	Rp (RENJA)	Rp (DPA)	I		II		III		IV		K	Rp	K	Rp	
							K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp					
1	2	3	4	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	28
	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Laporan	12	7.000.000	6.000.000	3	0	3	0	3	3.345.000	3	2.585.000	12	5.930.000,00	100	98,83	
	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	Laporan	12	110.000.000	110.000.000	3	18.123.122	3	18.765.964	3	17.717.279	3	18.358.888	12	72.965.253,00	100	66,33	
	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	Laporan	12	602.320.001	587.860.950	3	130.011.782	3	138.942.444	3	147.589.101	3	146.757.235	12	563.300.562,00	100	95,82	
Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah																			
	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	Unit	25	68.000.000	94.884.531	5	11.102.474	6	22.258.885	7	32.714.656	7	22.228.977	25	88.304.992,00	100	93,07	
	Pemeliharaan/ Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	Unit	1	82.496.050	132.494.570	0,3	0	0,3	0	0,3	131.952.697	0,1	0	1	131.952.697,00	100	99,59	

NO	BIDANG/ PROGRAM/ KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM/KEGIATAN	SATUAN	TARGET 2023			REALISASI PER TRIWULAN Th. 2023								REALISASI 2023		CAPAIAN 2023		KET
				K	Rp (RENJA)	Rp (DPA)	I		II		III		IV		K	Rp	K	Rp	
							K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp					
1	2	3	4	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	28
	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	Unit	10	10.000.000	30.500.000	3	7.000.000	3	4.800.000	3	11.790.000	1	6.685.000	10	30.275.000,00	100	99,26	
																Rata-rata Capaian Kinerja Kegiatan	100		
																Predikat	SANGAT TINGGI		
	PROGRAM PELATIHAN KERJA DAN PRODUKTIVITAS TENAGA KERJA																		
		Persentase peserta pelatihan kewirausahaan yang menjadi wirausaha berkembang	%	45			70		85,00		67,86		67,86		67,86		100		
		Persentase pencari kerja mendapatkan pelatihan berbasis kompetensi	%	65			60,38		71,54		71,91		72,39		72,39		100		
		Persentase peserta pelatihan yang menjadi wirausaha baru	%	45			20		80,00		64,29		64,29		64,29		100		
	Pelaksanaan Pelatihan Berdasarkan Unit Kompetensi																		
	Proses Pelaksanaan Pendidikan dan Pelatihan Ketrampilan bagi Pencari Kerja Berdasarkan Klaster Kompetensi	Jumlah Tenaga Kerja yang Mendapat Pelatihan Berbasis Kompetensi pada Tahun n	Orang	288	600.425.000	847.525.500	0	0	0	4.670.000	144	284.093.736	144	522264039	288	811.027.775	100,00	95,69	
	Pengadaan Sarana Pelatihan Kerja Kabupaten/Kota	Jumlah Pengadaan dan Pemeliharaan Sarana Pelatihan Kerja	Unit	1	55.000.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
																Rata-rata Capaian Kinerja Kegiatan	100		

NO	BIDANG/ PROGRAM/ KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM/KEGIATAN	SATUAN	TARGET 2023			REALISASI PER TRIWULAN Th. 2023								REALISASI 2023		CAPAIAN 2023		KET
				K	Rp (RENJA)	Rp (DPA)	I		II		III		IV		K	Rp	K	Rp	
							K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp					
1	2	3	4	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	28
																Predikat	SANGAT TINGGI		
2	PROGRAM PENEMPATAN TENAGA KERJA																		
		Presentase pencari kerja terdaftar yang ditempatkan	%	65			22,79		48,61		86,12		84,88		84,88		100		
		Tingkat setengah pengangguran	%	5,7			4,4		4,40		4,40		4,40		4,40		100		
		Presentase tenaga kerja formal	%	31			24,98		24,98		24,98		24,81		24,81		80,03		
	Pelayanan Antarkerja di Daerah Kabupaten/Kota																		
	Perluasan Kesempatan Kerja	Jumlah Tenaga Kerja yang Diberdayakan Melalui program Perluasan Kesempatan Kerja	Orang	140	0	390.191.000	0	0	100	178.237.442	40	178.486.844	0	31.620.500	140	388.344.786	100	99,53	
	Perlindungan PMI (Pra dan Purna Penempatan) di Daerah Kabupaten/Kota																		
	Peningkatan Perlindungan dan Kompetensi Calon Pekerja Migran Indonesia (PMI)/Pekerja Migran Indonesia (PMI)	Jumlah CPMI/PMI yang Dilindungi dan Ditingkatkan Kompetensinya	Orang	16	115.000.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
																Rata-rata Capaian Kinerja Kegiatan	100		
																Predikat	SANGAT TINGGI		

N O	BIDANG/ PROGRAM/ KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM/KEGIATAN	SAT UAN	TARGET 2023			REALISASI PER TRIWULAN Th. 2023								REALISASI 2023		CAPAIAN 2023		KET
				K	Rp (RENJA)	Rp (DPA)	I		II		III		IV		K	Rp	K	Rp	
							K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp					
1	2	3	4	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	28
3	PROGRAM HUBUNGAN INDUSTRIAL																		
		Proporsi Kepesertaan BPJS Ketenagakerjaan	%	79			84,21		84,91		91,01		90,83		90,83		100		
		Persentase perusahaan yang membayar upah sesuai UMK	%	58			77,12		81,36		80,87		81,58		81,58		100		
		Persentase perusahaan yang memenuhi sarana hubungan industrial	%	45			66,1		68,64		70,43		71,05		71,05		100		
		Persentase perselisihan hubungan industrial di luar pengadilan yang diselesaikan dengan perjanjian bersama	%	100			100		44,44		75		100		100,00		100,00		
	Pencegahan dan Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial, Mogok Kerja dan Penutupan Perusahaan di Daerah Kabupaten/Kota																		
	Pelaksanaan Operasional Lembaga Kerjasama Tripartit Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah LKS Tripartit yang Dibina	Lem baga	1	135.000.000	30.000.000	0,5	923.500	0,1	8.113.000	0,2	4.785.000	0,2	16.109.050	1	29.930.550,00	100,00	99,77	
																Rata-rata Capaian Kinerja Kegiatan Predikat	100,00	SANGAT TINGGI	

N O	BIDANG/ PROGRAM/ KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM/KEGIATAN	SAT UAN	TARGET 2023			REALISASI PER TRIWULAN Th. 2023								REALISASI 2023		CAPAIAN 2023		KET
				I		II		III		IV		K	Rp	K	Rp	K	Rp		
				K	Rp (RENJA)	Rp (DPA)	K	Rp	K	Rp	K							Rp	
1	2	3	4	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	28
B URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERINDUSTRIAN																			
4 PROGRAM PERENCANAAN DAN PEMBANGUNAN INDUSTRI																			
		Persentase IKM Industri yang Berbasis pada Komoditas Unggulan Daerah	%	35			12,92		65,85		70,46		70,46		70,46		100		
		Presentase Pembinaan Industri Penghasil Cukai	%	5,3			0		3,35		8,94		12,29		12,29		100		
Penyusunan dan Evaluasi Rencana Pembangunan Industri Kabupaten/Kota																			
	Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Kebijakan Percepatan Pengembangan, Penyebaran dan Perwilayahan Industri	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Kebijakan Percepatan, Pengembangan, Penyebaran dan Perwilayahan Industri	Doku men	1	50.000.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Pembangunan Sumber Daya Industri	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi, dan pelaksanaan Pembangunan Sumber Daya Industri	Doku men	1	100.000.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pemberdayaan Industri dan Peran Serta Masyarakat	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pemberdayaan Industri dan Peran Serta Masyarakat	Doku men	1	656.660.000	646.291.800	0	0	0,2	75.213.012	0,4	263.709.650	0,4	293.954.250	1	632.876.812	100,00	97,92	

NO	BIDANG/ PROGRAM/ KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM/KEGIATAN	SATUAN	TARGET 2023			REALISASI PER TRIWULAN Th. 2023								REALISASI 2023		CAPAIAN 2023		KET
				K	Rp (RENJA)	Rp (DPA)	I		II		III		IV		K	Rp	K	Rp	
							K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp					
1	2	3	4	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	26
	Evaluasi Terhadap Pelaksanaan Rencana Pembangunan Industri	Jumlah Dokumen Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Industri	Dokumen	1	100.000.000	0	0	0	0	0		0		0	0	0	0	0	
														Rata-rata Capaian Kinerja Kegiatan		100			
														Predikat	SANGAT TINGGI				
PROGRAM PENGENDALIAN IZIN USAHA INDUSTRI																			
Penerbitan Izin Usaha Industri (IUI), Izin Perluasan Usaha Industri (IPUI), Izin Usaha Kawasan Industri (IUKI) dan Izin Perluasan Kawasan Industri (IPKI) Kewenangan Kabupaten/Kota																			
	Fasilitasi Pemenuhan Komitmen Perolehan IUI, IPUI, IUKI dan IPKI Kewenangan Kabupaten/Kota dalam Sistem Informasi Industri Nasional (SIINas) yang terintegrasi dengan Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Verifikasi Teknis Pemenuhan Kesesuaian Persyaratan Teknis Perizinan Berusaha Sektor Industri dan/atau dalam rangka Perluasan Usaha untuk Bidang Usaha dengan Risiko Usaha Menengah-Tinggi dan Tinggi, Melalui SIINas yang Terintegrasi dengan Sistem OSS	Dokumen	1	900.000.000	150.000.000	0,25	31.308.350	0,25	34.292.499	0,25	27.463.800	0,25	56.795.350	1	149.859.999,00	100,00	99,91	
														Rata-rata Capaian Kinerja Kegiatan		100			
														Predikat	SANGAT TINGGI				

NO	BIDANG/ PROGRAM/ KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM/KEGIATAN	SATUAN	TARGET 2023		REALISASI PER TRIWULAN Th. 2023								REALISASI 2023		CAPAIAN 2023		KET							
				K	Rp (RENJA)	Rp (DPA)	I		II		III		IV		K	Rp	K		Rp						
							K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp											
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24		
PROGRAM PEMBANGUNAN KAWASAN TRANSMIGRASI																									
		Persentase calon transmigran yang mendapatkan pelatihan	%	100				0				100			100				100	0,00		100			
		Penataan Persebaran Penduduk yang Berasal dari 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota																							
		Pemindahan dan Penempatan Transmigran yang berasal dari 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	KK	5	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
																					Rata-rata Capaian Kinerja Kegiatan		0		
																					Predikat		SANGAT RENDAH		
	Jumlah				9.288.773.397	8.464.323.839		1.181.362.976	2.466.859.906	2.293.144.775	1.164.639.792	8.263.164.798													
																					RATA - RATA CAPAIAN KINERJA KEGIATAN		100,00	97,62	
																					PREDIKAT		SANGAT TINGGI		
																					RATA - RATA CAPAIAN KINERJA PROGRAM		98,46		
																					PREDIKAT		TIDAK TERCAPAI		

Disusun :
 Temanggung, 29 Desember 2023
 KEPALA DINAS PERINDUSTRIAN DAN TENAGA KERJA
 KABUPATEN TEMANGGUNG,

 Dra. SRI ENDANG PRAPTANINGSIH, M.Si.
 Pembina Tingkat I
 NIP. 19660712 199403 2 006

Dievaluasi :
 Temanggung,
 KEPALA BAPPEDA
 KABUPATEN TEMANGGUNG

 DWI SUKARNEI ST, MT
 Pembina Tingkat I
 NIP. 197405082003121008